



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Administrasi Publik (S-1)**

Oleh :

KIKIN AVIANDANI

NPM 21801091082



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

2022

ABSTRAK

Kikin Aviandani, 2022, NPM 21801091082, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang). Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin. M.Si, Dosen Pembimbing II: Dr. Sunariyanto, S.Sos., M.M

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 dalam mengatasi dan mencegah pencemaran air limbah domestik di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan pokok permasalahannya yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 sudah memenuhi beberapa unsur menurut Tachjan (2006) yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan yaitu unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, dan target group atau kelompok sasaran. Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan George C. Edward III dalam Agustino (2016) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan Bambang Sunggono (1994) yaitu informasi dan dukungan.

Kata Kunci: Air Limbah Domestik, Implementasi Kebijakan, Faktor pendukung, Faktor Penghambat.

ABSTRACT

Kikin Aviandani, 2022, NPM 21801091082, State Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Implementation of Curriculum Policy in Tugurejo Village, Kec. Wates Kab. Blitar. Advisor I: Prof.Dr. Yaqub Cikusin. M.Si, Advisor II: Dosen Pembimbing II : Dr. Sunariyanto, S.Sos., M.M

This research was conducted on the basis of Malang City Regional Regulation No. 2 of 2017 in overcoming and preventing domestic wastewater pollution in Malang City. The author concludes that the main problems are how is the implementation of Malang City Regional Regulation No. 2 of 2017 concerning Domestic Wastewater Management, and what are the supporting and inhibiting factors faced in the implementation of Malang City Regional Regulation No. 2 of 2017 concerning Domestic Wastewater Management. The purpose of this study is to describe the implementation of the Malang City Regional Regulation No. 2 of 2017 along with the supporting and inhibiting factors in the implementation of the regulation. Data collection techniques used are interview and observation.

The results of the study indicates that the implementation of the Malang City Regional Regulation No. 2 of 2017 has fulfilled several elements according to Tachjan (2006), namely the implementing element, the program being implemented, and the target group. Supporting factors in the implementation of Malang City Regional Regulation No. 2 of 2017 based on George C. Edward III in Agustino (2016) are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Furthermore, inhibiting factors in the implementation of Malang City Regional Regulation No. 2 of 2017 based on Bambang Sunggono (1994), namely information and support.

Keywords: Domestic Wastewater, Policy Implementation, Supporting Factors, Inhibiting Factors.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air adalah sumber kehidupan bagi umat manusia. Air mempunyai banyak peranan penting dalam kehidupan misalnya dalam bidang rumah tangga, industri, pertanian, dll. Banyaknya pemanfaatan air dalam segala aspek kehidupan manusia menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan akan air bersih. Hal itulah yang menyebabkan terus terjadinya peningkatan jumlah air limbah domestik.

Air limbah domestik adalah air yang kualitasnya dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Air limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu black water yang meliputi feces, urin dan grey water dari penggunaan air mandi, air limbah dapur dan air cucian (Said, 2017). Hasil dari air limbah domestik tersebut dapat menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan manusia.

Menurut Yokom (2015), air limbah domestik bisa menimbulkan dampak yang besar dan signifikan bagi lingkungan dan manusia terutama pencemaran dan penyakit menular. Dampak dari air limbah domestik tidak bisa dianggap remeh. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi keberlangsungan kualitas hidup manusia dan lingkungan sekitarnya terutama ekosistem sungai.

Sungai merupakan salah satu ekosistem yang berperan penting dalam keberlangsungan aktivitas manusia. Hal itu pula yang membuat sungai menjadi salah satu tempat pembuangan air limbah. Menurut Tarigan dkk (2013), sungai yang mempunyai kandungan organik dan anorganik yang tinggi, bersumber dari aktivitas masyarakat berupa pembuangan limbah cair ke sungai seperti mandi, cuci, dan kakus (MCK), hal ini dapat menurunkan kualitas air. Menurunnya kualitas air tentunya akan mengancam kondisi kesehatan masyarakat disekitar sungai tersebut dan mengancam keberlangsungan makhluk hidup lain disekitarnya. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka perlu adanya kegiatan pengolahan air limbah domestik.

Pengelolaan air limbah domestik mempunyai tujuan yang penting. Tujuan utama pengolahan air limbah tersebut adalah untuk mengurangi kandungan bahan pencemar terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroorganisme patogen dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme alam (Wulandari, 2014). Untuk mengurangi dampak pencemaran tersebut, masyarakat Indonesia harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hal itu. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak limbah domestik yang dibuang langsung ke ekosistem perairan tanpa penanganan terlebih dahulu juga dapat memperburuk keadaan pencemaran ekosistem perairan yang menerima limbah domestik. Hal ini juga diperkuat dari berita digital databoks.katadata.co.id yang menjelaskan tentang Laporan Statistik Lingkungan Indonesia tahun 2020 yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga, atau 57,42% di Indonesia, membuang air limbah mandi, cuci, dan memasak ke selokan/sungai.

Dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih minim pengetahuan tentang pengelolaan air limbah khususnya ekosistem sungai. Maka dari itu perlu adanya sebuah kebijakan publik yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik.

Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk mencapai tujuan nasional yang relevan (Riant Nugroho, 2012). Negara berperan penting dalam membuat suatu kebijakan publik untuk mengatasi masalah yang terjadi di negaranya. Salah satu kebijakan publik yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu kebijakan publik dalam mengatasi air limbah domestik. Kebijakan publik di Indonesia yang mengatur masalah air limbah domestik adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 3 Permukiman (KSNP-SPALP). Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat, juga sebagai acuan dan arahan untuk pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik di daerahnya. Salah satu daerah di Indonesia yang terdampak potensi pencemaran air limbah domestik adalah Kota Malang.

Penurunan kualitas air akibat pencemaran air limbah domestik sudah dirasakan oleh Kota Malang. Berdasarkan berita digital Republika.co.id (2016), limbah domestik mendominasi pencemaran air di kota Malang. Hasil studi tahunan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Malang menunjukkan bahwa limbah domestik berkontribusi 60-70% terhadap pencemaran air. CEO Walhi

Jatim Rere Christanto mengungkapkan, berdasarkan pengamatan fisik air sungai tahun 2014 di Malang, 98% pencemaran berasal dari limbah rumah tangga. Sedangkan Kota Malang, di sepanjang sungai Kalisari, Bangau, Amprong dan Brantas dikatakan sebagai titik pencemaran yang serius. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pencemaran air sungai akibat air limbah domestik di Kota Malang sudah sangat memprihatinkan. Jika permasalahan air limbah domestik di Kota Malang tidak segera ditangani dengan baik, maka akan berdampak pada kondisi ekosistem sungai, kesehatan masyarakat, dan sulitnya mendapatkan air bersih di Kota Malang.

Instansi Pemerintah Kota Malang yang bertugas dalam bidang pengolahan air limbah domestik yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR) Kota Malang. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2008 dan permasalahan air limbah domestik di Kota Malang, Pemerintah Daerah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengolahan Air Limbah Domestik. Peraturan tersebut menjadi acuan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengolahan air limbah domestik di Kota Malang.

Implementasi kebijakan, secara luas, adalah instrumen peraturan di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002). Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Pengelola Sumber daya air DPUPR di Kota Malang mengatakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut adalah

dengan adanya kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk mengedukasi masyarakat bahwa air limbah domestik bisa diolah dengan benar, salah satunya dengan menggunakan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL) (Wawancara, 06 Januari 2022).

Agar sebuah kebijakan dapat tercapai, maka implementasi kebijakan perlu memiliki beberapa unsur. Menurut Tachjan (2006), unsur implementasi kebijakan yang harus dipenuhi yaitu unsur pelaksana, adanya program, dan target group atau kelompok sasaran. Selain itu, dalam proses implementasi kebijakan, terdapat beberapa faktor yang selalu ada menyertai yaitu faktor pendukung dan penghambat. Menurut Bambang Sunggono (1994), ada beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi. Sedangkan faktor pendukung pengimplementasian kebijakan dijelaskan oleh C. Edward III dalam Agustino (2016) yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Adanya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan akan mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya, hal ini juga berlaku pada implementasi peraturan daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan air limbah domestik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Pengelola Sumber Daya Air, ditemukan faktor-faktor pendukung dalam menjalankan Perda Kota Malang No 2 Tahun 2017. Salah satu faktor pendukung tersebut adalah diberikannya kucuran dana dari Kementerian PUPR untuk menunjang terealisasinya pembangunan pengolahan air limbah domestik (Wawancara, 06 Januari 2022). Sedangkan

menurut Staff Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air untuk faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini salah satunya adalah kurangnya antusias masyarakat terhadap program ini dikarenakan masyarakat masih mempunyai pemikiran bahwa pembangunan pengolahan air limbah domestik dapat menimbulkan bau tidak sedap yang akan mengganggu aktivitas masyarakat disekitarnya (Wawancara, 23 Februari 2022).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian di DPUPR Kota Malang sebagai tugas akhir dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam ini yaitu sebagai bahan referensi dan tukar pikiran oleh DPUPR Kota Malang terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

1.4.2 Manfaat Akademik

Manfaat akademis dalam ini yaitu sebagai informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama yang menggunakan konsep yang sama dengan penulis yaitu implementasi kebijakan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 sudah terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Tachjan (2006) yaitu unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, dan target group atau kelompok sasaran. Unsur pelaksana dari kebijakan tersebut yaitu Dinas PUPR Kota Malang. Lalu program yang dijalankan dalam kebijakan tersebut adalah Program Sanitasi. Proses pelaksanaan program sanitasi sudah terealisasi dengan baik berdasarkan hasil LAKIP DPUPR Kota Malang Tahun 2021. Kemudian terakhir target group atau kelompok sasaran dari kebijakan tersebut adalah sekelompok masyarakat Kota Malang yang membutuhkan pengolahan air limbah domestik di lingkungannya.
2. Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan George C. Edward III dalam Agustino (2016) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk masing-masing faktor pendukung tersebut memiliki beberapa indikator. Untuk indikator komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsisten. Lalu indikator

sumber daya terdiri dari staff, informasi, wewenang, dan fasilitas. Kemudian indikator disposisi terdiri pengangkatan birokrat. Yang terakhir indikator struktur birokrasi terdiri dari SOP dan fragmentasi.

3. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan Bambang Sunggono (1994) yaitu informasi dan dukungan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Saran Akademis
 - a. Mempelajari lebih luas mengenai materi implementasi kebijakan, karena implementasi kebijakan tidak hanya membahas unsur-unsur dalam implementasi kebijakan saja. Tujuannya agar mempermudah peneliti selanjutnya dalam menentukan materi implementasi kebijakan yang mana perlu dibahas atau disajikan dalam penelitian atau skripsinya.
 - b. Banyak mempelajari tentang faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan. Karena terdapat beberapa teori atau pendapat menurut ahli mengenai faktor pendukung dan penghambat. Tujuannya agar mempermudah peneliti selanjutnya dalam menentukan teori faktor pendukung dan penghambat yang akan dibahas atau disajikan dalam atau penelitian skripsinya.

2. Saran Praktis

- a. Perlu adanya penambahan keterangan dalam isi kebijakan tentang kewajiban membangun pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat Kota Malang. Tujuannya agar semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan pengelolaan air limbah domestik di lingkungannya.
- b. Perlu adanya pemberian insentif untuk para staff Seksi AMAL. Tujuannya sebagai motivasi, penghargaan, dan semangat dalam menjalankan tugasnya.
- c. Perlu dikembangkan lagi dalam penggunaan sosial media (sosmed) dalam memperkenalkan program sanitasi. Bukan hanya melampirkan kegiatan sosialisasi saja, melainkan juga memperkenalkan lebih jelas perihal program sanitasi. Pengembangan sosmed bisa dengan cara membuat video semarik mungkin yang dapat menarik perhatian semua masyarakat dan aktif berkomunikasi dengan masyarakat disosmed. Penggunaan sosmed saat ini juga mencakup semua umur. Sehingga tidak hanya masyarakat dewasa saja yang mengetahui program ini melalui sosmed, melainkan juga dengan para remaja dan anak-anak. Sehingga semua kalangan memahami pentingnya program sanitasi.
- d. Perlu meningkatkan lagi keyakinan kepada masyarakat terkait pembangunan pengelolaan air limbah domestik tidak akan menimbulkan bau seperti yang masyarakat pikirkan. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menghadirkan salah satu masyarakat untuk meninjau tempat yang sudah pernah dibangun pengelolaan air limbah domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). Dasar-dasar kebijakan pu blik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Annur, Cindy Mutia. (2021, Agustus 23). Lebih dari 50% Rumah Tangga di Indonesia Membuang Air Limbah ke Selokan hingga Sungai[Halaman web]. Diunduh dari: <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/23/lebih-dari-50-rumah-tangga-di-indonesia-membuang-air-limbah-ke-selokan-hingga-sungai>>. [Diakses 10 November 2021]
- Budi, Winarno. 2005. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo
- Guntur Setiawan. (2004). Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Haedar Akib dan Antonius Tarigan. (2009). ARTIKULASI KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Kebijakan Publik. Jakarta
- Handoyo, Eko. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
- Islamy, Irfan. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bina Aksara
- Malangkota.go.id. (2021). Daftar Legislatif Kota Malang. Di unduh dari : <https://malangkota.go.id/daftar-legislatif/>. [Diakses 01 Januari 2022]
- Geografis. Diunduh dari : <<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>>. [Diakses 30 Desember 2021]
- Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2018-2020. Diunduh dari : <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>. [Diakses 30 Desember 2021]
- Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Menurut Lapangan Usaha (Persen (%)), 2018-2020. Diunduh dari : <<https://malangkota.bps.go.id/indicator/52/88/1/laju-pertumbuhan-ekonomi-kota-malang-menurut-lapangan-usaha.html>>. [Diakses 30 Desember 2021]
- Moleong, Lexy. J. (2016). Metodologi Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukarom Zaenal dan Wijaya Laksana. (2018). Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia

- Mulyadi, Deddy. (2015). Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta Suharno. 2008. Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Pablik. Yogyakarta : UNY Press.
- Nugroho, Riant. (2011). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- .(2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakata : Elex Media Komputindo.
- Nursalikhah, Ani &Christiyaningsih. (2016, Oktober 11). Kualitas air sungai kota malang buruk [Halaman web]. Diunduh dari: <<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/11/oevmvu366-kualitas-air-sungai-kota-malang-buruk>>. [Diakses 09 November 2021]
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan Air Limbah Dosmetik
- Prihati. (2018) Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- P. Siagian, (2006). Filsafat Administrasi, Jilid 1. Bandung. Penerbit Gramedia
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).
- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah. 17 (33) : 81-95. Diunduh dari: <<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>>. [Diakses 28 Oktober 2021]
- Said, Nusaidaman. (2017). Teknologi Pengolahan Air Limbah. Jakarta : Erlangga
- Solichin, Abdul Wahab. (2004). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- (2005). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Subarsono AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sunggono, Bambang. (1994). Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta : Sinar Grafika

- Syaukani, HR, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid. MA. (2004). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tachjan, H., Mariana, D., & Paskarina, C. (2006). Implementasi kebijakan publik. AIPI.
- Tahir, Arifin. (2015). Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan Adianse, Markus T. Lasut, & Sandra O. Tilaar. (2013). Kajian Kualitas Limbah Cair Domestik Di Beberapa Sungai Yang Melintasi Kota Manado Dari Aspek Bahan Organik Dan Anorganik. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis. Volume 1 Nomor 1. Diunduh dari: <<https://media.neliti.com/media/publications/125487-ID-none.pdf>>. [Diakses 07 November 2021]
- Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. (2002). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wulandari, Puji Retno. (2014). Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat (Studi Pada di Perumahan PT. Pertamina Unit Pelayanan III Plaju-Sumatera Selatan). Jurnal Teknil Sipil dan Lingkungan. Vol. 2 No. 3. Diunduh Dari:<<https://media.neliti.com/media/publications/212028-perencanaan-pengolahan-air-limbah-sistem.pdf>>. [Diakses 10 November 2021]
- Yokom, Henri. (2015). Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan Perumahan Rakyat. Jurnal Lingkungan. Diunduh dari: <<http://docplayer.info/38461941-Kerusakan-lingkungan-akibat-pembangunan-perumahan-rakyat.html>> . [Diakses 07 November 2021]